LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)

TRIWULAN II TAHUN 2026

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perangkat daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah). Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah provinsi mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah Provinsi. Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perubahan Perangkat Daerah dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perubahan Perangkat Daerah Provinsi dicapai, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah provinsi. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);3

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083);

C. Maksud dan Tujuan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2026 berdasarkan target-target indikator yang tercantum dalam Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.
3. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.

D. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

a.Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau ini adalah dengan menggunakan formulir evaluasi Renja yang akan diisi capaiannya oleh masing-masing bidang.

b.Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja ini adalah dengan menghitung:

(1) Persentase capaian kinerja masing-masing indikator dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau;

(2) Persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat

kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 1	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 2	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 3	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 4	Status
1	22,5 % ≤ 100 %	45 % ≤ 100 %	68 % ≤ 100%	91% ≤ 100%	Sangat tinggi (ST)
2	20 % ≤ 22,5 %	39 % ≤ 44 %	58 % ≤ 67%	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3	17 % ≤ 19 %	33 % ≤ 38 %	50 % ≤ 57%	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4	13 % ≤ 16 %	26 % ≤ 32 %	39 % ≤ 49%	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 13 %	≤ 25 %	≤ 38%	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. **Hasil Sedang**

   Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

c. Teknik Analisis Data

Teknis analisis dilakukan dengan teknik perbandingan antara realisasi kinerja dan keuangan dengan target kinerja dan anggaran; dan analisis permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dalam pencapaian target Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

"*Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Volume Usaha Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah*."

Tujuan ini mencerminkan kontribusi strategis koperasi dan UMKM dalam memperkuat struktur ekonomi berbasis kerakyatan serta mendukung hilirisasi dan pemanfaatan potensi unggulan daerah, terutama sektor kelautan, perdagangan antar wilayah, dan usaha produktif masyarakat. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan Misi ke-1 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, yakni "Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah." Peningkatan volume usaha koperasi dan UMKM menjadi strategi utama dalam memperbesar kapasitas, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing. Indikator utama yang digunakan berupa rasio volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai gambaran kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah sekaligus arah peningkatan kualitas kelembagaan. Secara umum, sasaran tahunan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi koperasi dan UKM yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Berikut ini merupakan rumusan tujuan dan sasaran serta program tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel 2.1.

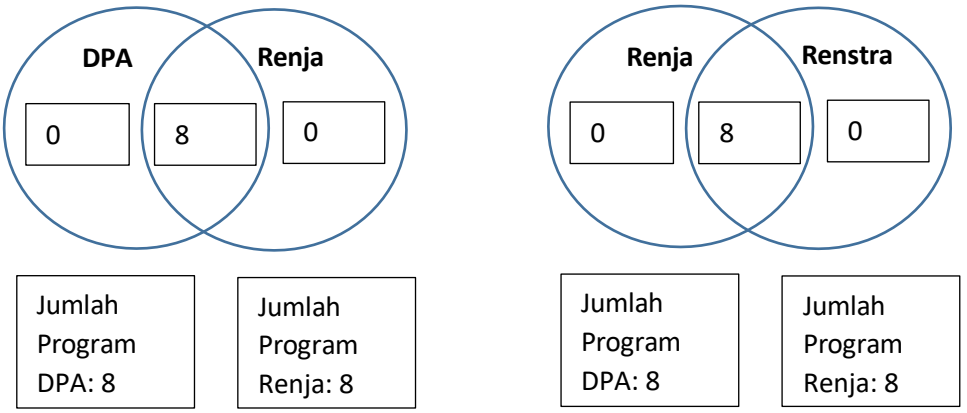
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2026
Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2026	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2026
A.	Meningkatnya kualitas Daya Saing Koperasi		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,556			
		Meningkatnya Skala Usaha Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	40,75	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam	18,88
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	30,5
						Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan	39,89
						Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi	5,82
						Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatannya	9,16
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2026	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2026
							Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	81,26
							Indeks Kepuasan Masyarakat	83,32
			Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	35.396	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Rasio Kewirausahaan Daerah	3,60
			Persentase UMKM yang Naik Kelas	%	30,85	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Rasio Kewirausahaan Daerah	3,60
							Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	15,15

BAB III
PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DPA, RENJA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

A. Perbandingan Jumlah Program DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 8 Program di Renja dari 8 Program di Renstra, dan melaksanakan 8 Program di DPA dari 8 Program yang tercantum pada Renja Tahun 2026.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi:

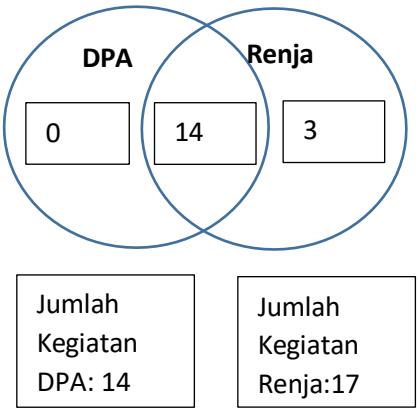
a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
c. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
d. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
g. Program Pengembangan UMKM

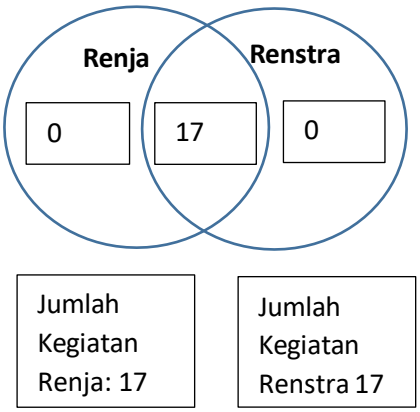
Kemudian dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi diperlukan program-program pendukung. Program pendukung untuk

pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

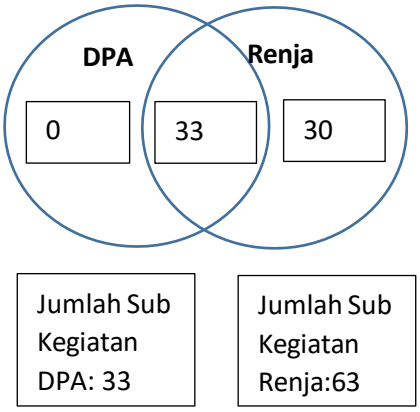
B. Perbandingan Jumlah Kegiatan DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah

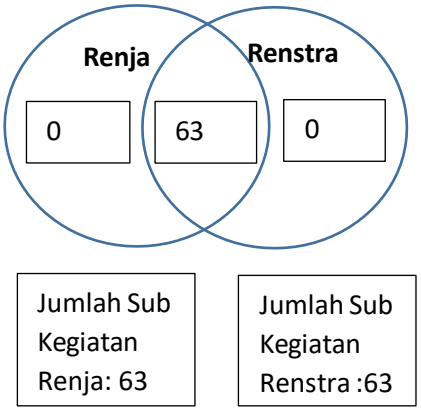




Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 14 kegiatan pada DPA TA 2026 dari 17 kegiatan berdasarkan Renja dari 17 kegiatan berdasarkan Renstra.

C. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah





Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 33 sub kegiatan pada DPA Tahun Anggaran 2026 dari 63 sub kegiatan berdasarkan Renja dari 63 kegiatan berdasarkan Renstra.

BAB IV
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN RENJA

A. Capaian Target Indikator Sasaran

Dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya indikator yang menjadi target Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau, sampai dengan triwulan I dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Pencapaian Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Triwulan II Tahun Anggaran 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	% Capaian Target	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Koperasi		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,556	0,4139	74,44	ST
		Meningkatnya skala usaha Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	40,55	0	0	SR
			Jumlah produk Tersertifikasi Halal	Produk	34.871	3.517	9,94	SR
			Persentase UMKM yang Naik Kelas	%	30,55	0	0	SR

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 Capaian realisasi kinerja indikator tujuan yaitu Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB sebesar 0,4139 % berdasarkan data olahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau per bulan Juni 2026 dengan capaian 74,44% dari Target dengan predikat Sangat Tinggi. Untuk Indikator sasaran Jumlah Produk tersertifikasi Halal sampai dengan Triwulan II dengan capaian sebesar 9,94% dan 2 indikator lainnya yaitu Persentase Koperasi yang Berkualitas dan Persentase UMKM yang Naik Kelas sebesar 0% dengan predikat Sangat Rendah. Hal ini disebabkan sebagian besar pelaksanaan Program pada Triwulan III dan IV

B. Capaian Target Indikator Program

Capaian target indikator program dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.2
Pencapaian Target Indikator Program
Triwulan II Tahun Anggaran 2026

No	Nama Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	% Capaian Target 2026	Predikat
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	100	ST
		2. Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	%	81,26	0	0	SR
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,32	0	0	SR
2	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	18.88	0	0	SR
3	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Diawasi	%	5.82	0	0	SR
4	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatanya	%	9,16	3,18	34,72	T
5	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	%	30,50	0	0	SR
6	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	%	39,89	0	0	SR
7	Pemberdayaan UMKM	1. Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3.60	3,63	100	ST
		2. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	%	15,15	11	72,61	ST
8	Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	35,19	3,97	11,28	SR
Rata-rata Capaian Kinerja Program Triwulan II			**%**	**30,18**			**R**

Pada Tahun 2026 sesuai dengan Renstra Dinas Koeprasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 melaksanakan 8 Program dengan 11 Indikator kinerja program. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 Capaian realisasi kinerja Program rata-rata adalah **30,18%** dengan predikat **Rendah**. Hal ini disebabkan sebagian besar pelaksanaan program dilaksanakan pada Triwulan III dan IV

C. Capaian Target Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 33 sub kegiatan dari total 63 sub kegiatan berdasarkan Renja dari 63 Sub kegiatan berdasarkan Renstra. Alokasi anggaran pada DPA Murni TA.2026 dengan sebesar Rp.21.260.376.700,- dan mengalami efisiensi pada pergeseran anggaran menjadi sebesar Rp.19.488.853.721,- pada Perkada III Tahun Anggaran 2026. Sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2026 Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Tahun 2026 sebagian telah dilaksanakan dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pencapaian Target Indikator Kegiatan
Triwulan II Tahun Anggaran 2026

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Renja Tahun 2026		Kategori Kinerja dan Anggaran Triwulan II Renja Tahun 2026		KET
		DPA Perkada III	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 43.515.000	Rp 4.480.600	50	10,3	T	SR	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 10.468.763.306	Rp 5.488.112.549	100	75,14	ST	ST	
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 446.352.000	Rp 148.507.000	50	33,27	ST	T	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 7.248.852	Rp 1.365.000	25	18,83	SR	SR	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 4.114.000	Rp 3.396.600	100	82,56	ST	ST	

6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 15.000.000	0	0	0	SR	SR	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 11.060.400	0	0	0	SR	SR	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 79.011.578	0	0	0	SR	SR	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 9.052.600	Rp 8.966.025	100	99,04	ST	ST	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 25.493.100	Rp. 5.169.520	100	20,28	ST	SR	
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 5.096.000	0	0	0	SR	SR	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 170.350.200	Rp 14.881.069	100	8,74	ST	SR	
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 9.271.500	Rp 8.990.000	100	96,96	ST	ST	
14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 534.334.447	Rp. 454.878.000	100	85,13	ST	ST	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
15	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 78.000.000	Rp. 78.000.000	100	100	ST	ST	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 4.049.500	0	0	0	SR	SR	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 12.600.000	Rp. 3.436.500	100	27,27	ST	R	
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 216.000.000	Rp 143.999.996	100	66,67	ST	ST	Pembayaran Tunda Bayar
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 121.196.664,00	Rp 81.235.972	100	67,03	ST	ST	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 108.500.000	Rp 59.752.300	55,56	55,07	ST	ST	

21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 11.817.000,00	0	0	0	SR	SR	
2	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**							
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
22	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 10.000.000,00	Rp 4.704.000	20	47,04	SR	T	
3	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**							
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
23	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Rp 110.188.000,00	0	0	0	SR	SR	
4	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**							
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
24	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Rp 10.000.100,00	0	0	0	SR	SR	
5	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**							
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							

25	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp 317.803.000	0	0	0	SR	SR	
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**							
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
26	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Rp 579.238.000,00	Rp 325.000.000	0	56,11	SR	ST	Pembayaran Tunda Bayar
27	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Rp 10.000.000,00	0	0	0	SR	SR	
7	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**							
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan							
28	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Rp 1.759.880.000,00	Rp 62.000.000	0	3,52	SR	SR	Pembayaran Tunda Bayar
29	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Rp 793.001.400,00	Rp 57.470.400	0	7,25	SR	SR	Pembayaran Tunda Bayar

30	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Rp 438.687.665,00	Rp 188.348.665	14,29	42,93	SR	T	Pembayaran Tunda Bayar
31	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Rp 349.999.983,00	Rp 349.999.983	100	100	ST	ST	Pembayaran Tunda Bayar
8	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**							
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha MenjadiUsaha Menengah							
32	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Rp 2.345.175.925	Rp 296.000.000	9,41	12,62	SR	SR	
33	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Rp 584.053.500	0	0	0	SR	SR	
Total rata-rata Capaian		**Rp 19.488.853.721**	**Rp 10.166.461.272**	**26,63**	**52,17**	**R**	**ST**	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa. Sampai dengan Triwulan II Capaian realisasi Keuangan Rata-rata sebesar 52,17% dengan Predikat **Sangat Tinggi** dan Capaian Kinerja rata-rata sebesar 26,63% dengan berpredikat **Rendah**. Hal ini disebabkan oleh pembayaran tunda bayar tahun anggaran 2025 pada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan sehingga realisasi keuangan lebih tinggi dari Realisasi Kinerja. Kemudian sebagian besar pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Triwulan III dan IV.

BAB V
KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

a. Kendala/Permasalahan

Pelaksanaan dan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Keuangan Sampai adalah **30,18%** masih tergolong **Sangat Rendah (SR),** Hal ini disebabkan oleh beberapa Kendala dan permasalahan yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja pada Triwulan II masih belum optimal karena sebagian besar kegiatan substantif dan penyerapan anggaran dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Triwulan III sampai dengan Triwulan IV.
2. Pelaksanaan survey Kepuasan Masyarakat pada Triwulan III;
3. Penilaian IP ASN dilakukan pada TW IV;
4. Sebagian belanja barang jasa masih menunggu proses pembayaran;
5. Terdapat beberapa target kinerja sub kegiatan yang tidak didukung oleh anggaran karena terjadi efesiensi anggaran pada tahapan KUA PPAS.
6. Capaian Indikator Program pada Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam (%) belum tercapai karena Belum ada permohanan masyarakat untuk fasilitasi Akta Notaris sampai dengan Triwulan II.
7. Capaian indikator sub kegiatan pada Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha) belum tercapai karena Belum ada pengajuan dari masyarakat yang akan membentuk koperasi
8. Keterbatasan fiskal daerah sehingga Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Triwulan I dilaksanakan lebih selektif mengingat masih berlangsungnya proses penyesuaian anggaran.

b. Faktor pendorong keberhasilan

Yang menjadi faktor pendorong keberhasilan perangkat daerah dalam pencapaian target kinerja perangkat daerah adalah SDM yang kompeten dan Koordinasi dan komunikasi yang ekfektif antar unit kerja dalam lingkup Perangkat Daerah.

c. Faktor penghambat keberhasilan

Yang menjadi faktor penghambat keberhasilan perangkat daerah dalam pencapaian target kinerja perangkat daerah adalah Keterbatasan SDM dan Alokasi anggaran yang belum optimal dalam pecapaian kinerja

d. Tindaklanjut

Sebagai upaya tindaklanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan Triuwulan II Tahun 2026 melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap capaian kinerja secara berkala disetiap unit kerja serta meningkatkan koordinasi kepada pihak terkait dalam rangka percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2026 telah berusaha menunjukkan kinerja yang maksimal melalui pelaksanaan serangkaian program-program yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang diembannya untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Pada tahun 2026 ini DKUKM Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 8 (delapan) Program yang terbagi dalam 14 (empat belas) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan.

Secara umum realisasi fisik dan keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepri yang didanai dari APBD pada Triwulan I tahun 2026 masih tergolong Sangat Rendah. Rata-rata persentase capaian kinerja Program pada Tahun 2026 sebesar **30,18%** dan keuangan sebesar **52,17%** atau sebesar **Rp.10.166.461.272**,- dari Anggaran sebesar **Rp.19.488.853.721,-**

Keselarasan program dan kegiatan telah sesuai dengan APBD, RKPD dan RPJMD. Keselarasan tersebut dapat mempengaruhi indikator capaian kinerja dan program pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Rekomendasi

Dalam penyusunan alokasi anggaran TAPD Provinsi Kepri dapat memberikan alokasi anggaran yang proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan Dinas.

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja yang rendah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan mengupayakan menganggarkan kembali kegiatan-kegiatan yang dimaksud pada APBD.

Terkait upaya peningkatan keselerasan program dan kegiatan antara APBD, RKPD dan RPJMD, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya sinergi dan sinkronisasi beberapa kegiatan, menjadi satu kegiatan dengan nomebklaturbaru,agar pencapaian indikator kinerja lebih terukur dan terarah.

PENUTUP

Demikianlah Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Triwulan I Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dibuat sebagai Laporan Evaluasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau serta menjadi bahan evaluasi dan pengendalian pada tahun anggaran yang akan datang. Dengan dibuatnya laporan Evaluasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau ini diharapkan akan lebih memudahkan bagi pimpinan dan staf dalam mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan ke depannya.

LAMPIRAN

TABEL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA

TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026

Rekapitulasi Capaian Program pada Evaluasi Hasil RKPD
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KEPULAUAN RIAU
Kondisi Sampai Dengan : Triwulan II Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.380.826.148	37,50	46,02	8.882.938.224	71,75
2	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	10.000.000	0,00	0,00	-	0,00
3	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	110.188.000	0,00	0,00	-	0,00
4	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	10.000.100	34,72	20,00	4.704.000	47,04
5	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	117.803.000	0,00	0,00	-	0,00
6	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	589.238.000	0,00	0,00	325.000.000	55,16
7	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.341.569.048	86,72	10,39	657.819.048	19,69
8	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.929.229.425	11,28	18,24	296.000.000	10,11
	TOTAL		19.488.853.721	30,18	26,63	10.166.461.272	52,17

Rekapitulasi Capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPD
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KEPULAUAN RIAU
Kondisi Sampai Dengan : Triwulan II Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Program / Kegiatan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				
1	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.515.000	12,50	4.480.600	10,30
2	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.922.364.159	91,67	8.015.751.642	73,39
3	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	0,00	-	0,00
4	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.114.000	50,00	3.396.600	17,77
5	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	843.669.825	55,56	492.884.614	58,42
6	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.000.000	33,33	78.000.000	100,00
7	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.846.164	75,00	228.672.468	64,62
8	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.317.000	18,52	59.752.300	49,66
	2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**				
9	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10.000.000	0,00	-	0,00
10	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	0,00	-	0,00
	2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**				
11	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	110.188.000	0,00	-	0,00
12	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	0,00	-	0,00
	2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**				
13	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10.000.100	20,00	4.704.000	47,04
	2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**				
14	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	117.803.000	0,00	-	0,00
	2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**				
15	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	589.238.000	0,00	325.000.000	55,16

No.	Kode	Uraian Program / Kegiatan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan	
					(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	2.17.07	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**				
16	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	3.341.569.048	10,39	657.819.048	19,69
	2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**				
17	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	2.929.229.425	18,24	296.000.000	10,11
	TOTAL		19.488.853.721	26,63	10.166.461.272	52,17

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KEPULAUAN RIAU
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Rasio Kinerja / Anggaran RENJA-SKPD (RASIO EFISIENSI)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Rasio Kinerja / Anggaran RENSTRA (RASIO EFISIENSI)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15	16 = 13		17=16/6 x100%		18	19	20
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		K	Rp	K	%			
		2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**188.506.694.351**		**32.950.071.736**		**19.488.853.721**		**2.482.406.921**		**7.684.054.351**						**10.166.461.272**	**26,63**	**52,17**	**0,51**		**10.166.461.272**	**7,53**	**5,39**	**1,4**		
		2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**69.937.247.664**		**12.129.610.936**		**12.380.826.148**		**2.482.406.921**		**6.400.531.303**						**8.882.938.224**	**46,02**	**71,75**	**0,64**		**8.882.938.224**	**13,29**	**12,7**	**1,05**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	80		80		80				90						90		112,5			90		112,5				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,72		82,22		83,32		0		0						0		0			0		0				
				Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	82,08		82,03		81,26		0		0						0		0			0		0				
		2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.480.000.000		78.979.700		43.515.000		-		4.480.600						4.480.600	12,5	10,3	**1,21**		4.480.600	2,5	0,3	**8,33**		
			Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		0		1						1		50			1		10				
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10		0		2		0		0						0		0			0		0				
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	30		0		6		0		0						0		0			0		0				
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0			0		0				
		2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			850.000.000		78.979.700		43.515.000		-		4.480.600						4.480.600	50	10,3	**4,85**		4.480.600	10	0,53	**18,87**		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		2		0		1						1		50			1		10				
		2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10		0		2		0		0						0		0			0		0				
		2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	30		0		6		0		0						0		0			0		0				
		2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			180.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0			0		0				
		2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			55.054.551.550		9.824.362.142		10.922.364.159		2.377.767.093		5.637.984.549						8.015.751.642	91,67	73,39	**1,25**		8.015.751.642	70	14,56	**4,81**		
			Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	30		32		30		30		30						60		200			60		200				
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		4		4		0		2						2		50			2		10				
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0			0		0				
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0		0		4		0		1						1		25			1		0				
		2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			52.548.026.050		9.406.028.642		10.468.763.306		2.377.767.093		5.488.112.549						7.865.879.642	200	75,14	**2,66**		7.865.879.642	200	14,97	**13,36**		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	30		32		30		30		30						60		200			60		200				
		2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2.181.525.500		418.333.500		446.352.000		-		148.507.000						148.507.000	50	33,27	**1,5**		148.507.000	10	6,81	**1,47**		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	20		4		4		0		2						2		50			2		10				
		2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			325.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0			0		0				
		2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			-		-		7.248.852		-		1.365.000						1.365.000	25	18,83	**1,33**		1.365.000	0	0			
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0		0		4		0		1						1		25			1		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Rasio Kinerja / Anggaran RENJA-SKPD (RASIO EFISIENSI)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Rasio Kinerja / Anggaran RENSTRA (RASIO EFISIENSI)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15	16 = 13		17=16/6 x100%		18	19	20
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		K	Rp	K	%			
		2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			60.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0				0					
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0				0					
		2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			30.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0				0					
		2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			30.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0				0					
		2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			733.000.000		24.291.000		19.114.000		-		3.396.600						3.396.600	50	17,77	**2,81**		3.396.600	7,14	0,46	**15,53**		
			Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Orang)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	504		0		72		0		72						72		100				72		14,29			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	64		1		10		0		0						0		0				0		0			
		2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			363.000.000		-		4.114.000		-		3.396.600						3.396.600	100	82,56	**1,21**		3.396.600	14,29	0,94	**15,2**		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	504		0		72		0		72						72		100				72		14,29			
		2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			370.000.000		24.291.000		15.000.000		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	64		1		10		0		0						0		0				0		0			
		2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.520.000.000		1.094.793.939		843.669.825		59.940.000		432.944.614						492.884.614	55,56	58,42	**0,95**		492.884.614	11,11	8,93	**1,24**		
			Tersedianya administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0				0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0				0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		1						1		100				1		20			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		1						1		100				1		20			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		0		3		0		0						0		0				0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0				0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		1		1		0		1						1		100				1		20			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		1						1		100				1		20			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10		1		2		1		1						2		100				2		20			
		2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			50.000.000		3.063.600		11.060.400		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0				0		0			
		2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			680.000.000		44.992.001		79.011.578		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0				0		0			
		2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			125.000.000		2.724.000		9.052.600		-		8.966.025						8.966.025	100	99,04	**1,01**		8.966.025	20	7,17	**2,79**		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		1						1		100				1		20			
		2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			380.000.000		19.071.842		25.493.100		-		5.169.520						5.169.520	100	20,28	**4,93**		5.169.520	20	1,36	**14,71**		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		1						1		100				1		20			
		2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			420.000.000		1.640.000		5.096.000		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		0		3		0		0						0		0				0		0			
		2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.175.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0				0		0			
		2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.250.000.000		181.266.196		170.350.200		-		14.881.069						14.881.069	100	8,74	**11,44**		14.881.069	20	0,66	**30,3**		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		1		1		0		1						1		100				1		20			
		2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			90.000.000		1.800.000		9.271.500		-		8.990.000						8.990.000	100	96,96	**1,03**		8.990.000	20	9,99	**2**		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5		1		1		0		1						1		100				1		20			
		2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			350.000.000		840.236.300		534.334.447		59.940.000		394.938.000						454.878.000	100	85,13	**1,17**		454.878.000	20	129,97	**0,15**		

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Rasio Kinerja / Anggaran RENJA-SKPD (RASIO EFISIENSI)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Rasio Kinerja / Anggaran RENSTRA (RASIO EFISIENSI)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15	16 = 13		17=16/6 x100%		18	19	20
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		K	Rp	K	%			
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10		1		2		1		1						2		100			2		20				
		2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.970.000.000		120.000.000		78.000.000		-		78.000.000						78.000.000	33,33	100	0,33		78.000.000	4	2,63	1,52		
			Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang (Dengan Satuan:Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		1		0		0						0		0			0		0				
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	9		0		2		0		0						0		0			0		0				
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		0						0		0			0		0				
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		1		1		0		1						1		100			1		20				
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0			0		0				
		2.17.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.200.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		1		0		0						0		0			0		0				
		2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			550.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	9		0		2		0		0						0		0			0		0				
		2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel			120.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		0						0		0			0		0				
		2.17.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			900.000.000		120.000.000		78.000.000		-		78.000.000						78.000.000	100	100	1		78.000.000	20	8,67	2,31		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		1		1		0		1						1		100			1		20				
		2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0			0		0				
		2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.759.696.114		846.684.437		353.846.164		24.719.828		203.952.640						228.672.468	75	64,62	1,16		228.672.468	15	8,29	1,81		
			Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air, listrik, peralatan, perlengkapan dan pelayanan umum kantor Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri (Dengan Satuan:Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0			0		0				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		1						1		100			1		20				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		1						1		100			1		20				
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1		0						1		100			1		20				
		2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			110.000.000		-		4.049.500		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0			0		0				
		2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			105.000.000		24.037.238		12.600.000		-		3.436.500						3.436.500	100	27,27	3,67		3.436.500	20	3,27	6,12		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		1						1		100			1		20				
		2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.360.000.000		48.854.000		216.000.000		-		143.999.996						143.999.996	100	66,67	1,5		143.999.996	20	10,59	1,89		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		1						1		100			1		20				
		2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.184.696.114		773.793.199		121.196.664		24.719.828		56.516.144						81.235.972	100	67,03	1,49		81.235.972	20	6,86	2,92		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		1		0						1		100			1		20				
		2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.360.000.000		140.499.718		120.317.000		19.980.000		39.772.300						59.752.300	18,52	49,66	0,37		59.752.300	3,7	4,39	0,84		
			Terlaksananya Jasa pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	45		9		9		1		4						5		55,56			5		11,11				
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100		20		20		0		0						0		0			0		0				
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0			0		0				
		2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			800.000.000		115.730.818		108.500.000		19.980.000		39.772.300						59.752.300	55,56	55,07	1,01		59.752.300	11,11	7,47	1,49		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	45		9		9		1		4						5		55,56			5		11,11				
		2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			135.000.000		24.768.900		11.817.000		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100		20		20		0		0						0		0			0		0				

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Rasio Kinerja / Anggaran RENJA-SKPD (RASIO EFISIENSI)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Rasio Kinerja / Anggaran RENSTRA (RASIO EFISIENSI)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15	16 = 13		17=16/6 x100%		18	19	20
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		K	Rp	K	%			
		2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			425.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0			0		0				
		2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**			**960.000.000**		**13.000.000**		**10.000.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**			**-**	**0**	**0**		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam (%)	20,7		33,33		18,88		0		0						0		0			0		0				
		2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			500.000.000		13.000.000		10.000.000		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terfasilitasinya KSP/USP mendapatkan penerbitan izin usaha (Dengan Satuan:KSP/ USP)	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	75		5		5		0		0						0		0			0		0				
		2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			500.000.000		13.000.000		10.000.000		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	75		5		5		0		0						0		0			0		0				
		2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			460.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terfasilitasinya KSP/USP mendapatkan penerbitan izin usaha kantor cabang (Dengan Satuan:KSP/ USP)	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	5		0		1		0		0						0		0			0		0				
		2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			460.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi&	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	5		0		1		0		0						0		0			0		0				
		2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			**1.265.000.000**		**1.281.000**		**110.188.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**			**-**	**0**	**0**		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi yang Diawasi (%)	7,39		5,67		5,82		0		0						0		0			0		0				
		2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			645.000.000		1.281.000		110.188.000		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi (Dengan Satuan:Koperasi)	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	125		15		80		0		0						0		0			0		0				
		2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			645.000.000		1.281.000		110.188.000		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	125		15		80		0		0						0		0			0		0				
		2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			620.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (Dengan Satuan:Koperasi)	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	125		0		25		0		0						0		0			0		0				
		2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			620.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	125		0		25		0		0						0		0			0		0				
		2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			**620.000.000**		**2.160.000**		**10.000.100**		**-**		**4.704.000**						**4.704.000**	**20**	**47,04**	**0,43**		**4.704.000**	**4**	**0,76**	**5,26**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya (%)	10,9		7,1		9,16		0		3,18						3,18		34,72			3,18		29,17				
		2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			620.000.000		2.160.000		10.000.100		-		4.704.000						4.704.000	20	47,04	**0,43**		4.704.000	4	0,76	**5,26**		
			Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (Dengan Satuan:Koperasi)	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	125		7		25		0		5						5		20			5		4				
		2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan			620.000.000		2.160.000		10.000.100		-		4.704.000						4.704.000	20	47,04	**0,43**		4.704.000	4	0,76	**5,26**		
			Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	125		7		25		0		5						5		20			5		4				
		2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			**1.120.000.000**		**99.200.000**		**117.803.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**			**-**	**0**	**0**		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan (%)	37,5		142,1		30,50		0		0						0		0			0		0				
		2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1.120.000.000		99.200.000		117.803.000		-		-						-	0	0			-	0	0			

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Rasio Kinerja / Anggaran RENJA-SKPD (RASIO EFISIENSI)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Rasio Kinerja / Anggaran RENSTRA (RASIO EFISIENSI)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15	16 = 13		17=16/6 x100%		18	19	20
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		K	Rp	K	%			
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Koperasi (Dengan Satuan:Koperasi)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	535		854		107		0		0						0		0			0		0					
		2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			1.120.000.000		99.200.000		117.803.000		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	535		854		107		0		0						0		0			0		0					
	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			**11.160.000.000**		**2.279.207.603**		**589.238.000**		**-**		**325.000.000**						**325.000.000**	**0**	**55,16**	**0**		**325.000.000**	**0**	**2,91**	**0**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan (%)	50,12		69,72		39,89		0		0						0		0			0		0					
		2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			11.160.000.000		2.279.207.603		589.238.000		-		325.000.000						325.000.000	0	55,16	**0**		325.000.000	0	2,91	**0**		
			Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (Dengan Satuan:Koperasi)	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	135		9		27		0		0						0		0			0		0					
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	136		3		30		0		0						0		0			0		0					
				Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	240		0		60		0		0						0		0			0		0					
				Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya (Unit Usaha)	26		0		6		0		0						0		0			0		0					
				Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	50		0		10		0		0						0		0			0		0					
				Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	50		0		10		0		0						0		0			0		0					
				Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	50		0		10		0		0						0		0			0		0					
				Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan (Unit Usaha)	135		0		6		0		0						0		0			0		0					
		2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			4.350.000.000		2.276.227.603		579.238.000		-		325.000.000						325.000.000	0	56,11	**0**		325.000.000	0	7,47	**0**		
			Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	135		9		27		0		0						0		0			0		0					
		2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			900.000.000		2.980.000		10.000.000		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	136		3		30		0		0						0		0			0		0					
		2.17.06.1.01.0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi			600.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	240		0		60		0		0						0		0			0		0					
		2.17.06.1.01.0005	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			800.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya (Unit Usaha)	26		0		6		0		0						0		0			0		0					
		2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			350.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	50		0		10		0		0						0		0			0		0					
		2.17.06.1.01.0007	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			350.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	50		0		10		0		0						0		0			0		0					

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Rasio Kinerja / Anggaran RENJA-SKPD (RASIO EFISIENSI)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Rasio Kinerja / Anggaran RENSTRA (RASIO EFISIENSI)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV															
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15	16 = 13		17=16/6 x100%		18	19	20		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		K	Rp	K	%					
		2.17.06.1.01.0008	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			350.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0					
			Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	50		0		10		0		0						0		0			0		0						
		2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			3.460.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0					
			Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan (Unit Usaha)	135		0		6		0		0						0		0			0		0						
	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**67.046.135.051**		**14.573.871.921**		**3.341.569.048**		**-**		**657.819.048**						**657.819.048**	**10,39**	**19,69**	**0,53**		**657.819.048**	**2,08**	**0,98**	**2,12**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
			Meningkatnya Produktivitas UMKM	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,76		4,01		3,60		0		3,63						3,63		100,83			3,63		76,26					
				Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)	77,75		16,05		15,15		0		11						11		72,61			11		14,15					
		2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			67.046.135.051		14.573.871.921		3.341.569.048		-		657.819.048						657.819.048	10,39	19,69	**0,53**		657.819.048	2,08	0,98	**2,12**			
			Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Dengan Satuan:Jumlah Wirausaha Baru)	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	2250		1.800		450		0		0						0		0			0		0						
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	9830		5.250		250		0		0						0		0			0		0						
				Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	25		0		5		0		0						0		0			0		0						
				Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	200		0		40		0		0						0		0			0		0						
				Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata (Unit Usaha)	500		6.317		100		0		0						0		0			0		0						
				Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	200		0		40		0		0						0		0			0		0						
				Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	25		0		5		0		0						0		0			0		0						
				Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	175		1		35		0		5						5		14,29			5		2,86						
				Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	100		0		20		0		0						0		0			0		0						
				Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	875		150		175		0		175						175		100			175		20						
				Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	75		0		15		0		0						0		0			0		0						
		2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			13.466.689.209		4.915.454.819		1.759.880.000		-		62.000.000						62.000.000	0	3,52	**0**		62.000.000	0	0,46	**0**			
			Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	2250		1.800		450		0		0						0		0			0		0						
		2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan			45.454.445.842		9.182.799.059		793.001.400		-		57.470.400						57.470.400	0	7,25	**0**		57.470.400	0	0,13	**0**			
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	9830		5.250		250		0		0						0		0			0		0						
		2.17.07.1.01.0003	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil			600.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0					
			Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Kecil dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	25		0		5		0		0						0		0			0		0						
		2.17.07.1.01.0004	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			600.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0					
			Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	200		0		40		0		0						0		0			0		0						
		2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil			1.550.000.000		307.260.000		-		-		-						-	0	0			-	0	0					
			Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata (Unit Usaha)	500		6.317		100		0		0						0		0			0		0						
		2.17.07.1.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil			750.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0					
			Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	200		0		40		0		0						0		0			0		0						
		2.17.07.1.01.0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil			425.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0					

No	Sasaran	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Rasio Kinerja / Anggaran RENJA-SKPD (RASIO EFISIENSI)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Rasio Kinerja / Anggaran RENSTRA (RASIO EFISIENSI)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15	16 = 13		17=16/6 x100%		18	19	20
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		K	Rp	K	%			
			Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	25		0		5		0		0						0		0			0		0				
		2.17.07.1.01.0009	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik			1.250.000.000		27.749.902		438.687.665		-		188.348.665						188.348.665	14,29	42,93	**0,33**		188.348.665	2,86	15,07	**0,19**		
			Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	175		1		35		0		5						5		14,29			5		2,86				
		2.17.07.1.01.0010	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	100		0		20		0		0						0		0			0		0				
		2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha			1.950.000.000		140.608.141		349.999.983		-		349.999.983						349.999.983	100	100	**1**		349.999.983	20	17,95	**1,11**		
			Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	875		150		175		0		175						175		100			175		20				
		2.17.07.1.01.0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Mengakses Perizinan Berusaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	75		0		15		0		0						0		0			0		0				
	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**36.398.311.636**		**3.851.740.276**		**2.929.229.425**		**-**		**296.000.000**						**296.000.000**	**18,24**	**10,11**	**1,8**		**296.000.000**	**3,65**	**0,81**	**4,5**	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan (%)	36,39		86,33		35,19		0		3,97						3,97		11,28			3,97		10,91				
		2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			36.398.311.636		3.851.740.276		2.929.229.425		-		296.000.000						296.000.000	18,24	10,11	**1,8**		296.000.000	3,65	0,81	**4,5**		
			Terlaksananya fasilitasi pengembangan UMKM (Dengan Satuan:UMKM)	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	4250		463		850		0		80						80		9,41			80		1,88				
				Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (Orang)	1250		0		250		0		0						0		0			0		0				
				Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	65		60		15		0		0						0		0			0		0				
				Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	5		1		1		0		1						1		100			1		20				
				Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)	500		0		100		0		0						0		0			0		0				
				Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	250		0		1		0		0						0		0			0		0				
		2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			17.347.527.625		1.447.660.896		2.345.175.925		-		296.000.000						296.000.000	9,41	12,62	**0,75**		296.000.000	1,88	1,71	**1,1**		
			Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	4250		463		850		0		80						80		9,41			80		1,88				
		2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (Orang)	1250		0		250		0		0						0		0			0		0				
		2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil			8.516.895.000		1.511.458.000		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Kecil menjadi Usaha menengah melalui pendampingan, kemitraan, perluasan pasar, akses pembiayaan dan investasi, pengembangan SDM, dan/atau kegiatan lainnya	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	65		60		15		0		0						0		0			0		0				
		2.17.08.1.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang			5.700.000.000		892.621.380		584.053.500		-		-						-	100	0			-	20	0			
			Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	5		1		1		0		1						1		100			1		20				
		2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan			1.550.000.000		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)	500		0		100		0		0						0		0			0		0				
		2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil			2.283.889.011		-		-		-		-						-	0	0			-	0	0			
			Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	250		0		1		0		0						0		0			0		0				
			JUMLAH			**188.506.694.351**		**32.950.071.736**		**19.488.853.721**		**2.482.406.921**		**7.684.054.351**						**10.166.461.272**					**10.166.461.272**					
			Rata-rata capaian kinerja (%)																		**26,63**	**52,17**	**0,51**			**7,53**	**5,39**	**1,4**		**SUB KEGIATAN**
			Predikat kinerja																		**Sangat Rendah**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			
			Rata-rata capaian kinerja (%)																		**30,18**					**22,09**				**PROGRAM**
			Predikat kinerja																		**Sangat Rendah**					**Sangat Rendah**				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	SDM yang kompeten dan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar unit kerja dalam lingkup Perangkat Daerah
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	Keterbatasan SDM dan alokasi anggaran yang belum optimal dalam pencapaian kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	Percepatan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya	:	Melakukan penyesuaian target kinerja dengan alokasi anggaran pada Perubahan Renja